

TESIS

**TANGGUNG JAWAB DOKTER HEWAN DALAM PENCEGAHAN
PENYAKIT ZONOSIS
UNTUK MEWUJUDKAN HAK ATAS KESEHATAN MASYARAKAT DI
KOTA BEKASI**



Diajukan Oleh
Yunita Lestyorini
21. C2. 0048

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2025

TESIS

**TANGGUNG JAWAB DOKTER HEWAN DALAM PENCEGAHAN
PENYAKIT ZONOSIS
UNTUK MEWUJUDKAN HAK ATAS KESEHATAN MASYARAKAT DI
KOTA BEKASI**

Diajukan dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum Kesehatan



Diajukan Oleh
Yunita Lestyorini
21. C2. 0048

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2025

ABSTRAK

Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara dan diatur Undang-Undang. Kesehatan manusia berkaitan erat dengan kesehatan hewan, beberapa penyakit pada hewan dapat menular ke manusia. Zoonosis adalah penyakit yang ditularkan oleh hewan ke manusia. Rabies merupakan penyakit *zoonosis* berbahaya yang dapat menyebabkan kematian. Kesehatan hewan merupakan tanggung jawab dokter hewan sebagai upaya pencegahan penyakit rabies. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pengaturan tentang tanggung jawab dokter hewan dalam upaya pencegahan penyakit rabies melalui pelayanan jasa medik veteriner di Kota Bekasi, bagaimana pelaksanaan tanggung jawab dokter hewan dalam upaya pencegahan penyakit rabies melalui pelayanan jasa medik veteriner di Kota Bekasi, apa tantangan pelaksanaan tanggung jawab dokter hewan dalam pencegahan penyakit rabies melalui pelayanan jasa medik veteriner di Kota Bekasi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data yang dilakukan dengan pengumpulan data primer melalui studi lapangan dengan wawancara. Data sekunder diperoleh melalui buku, peraturan Perundang-Undangan, teks, jurnal, dan pendapat para pakar. Pada penelitian ini metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Data dianalisa secara deskriptif untuk memperoleh gambaran jelas, menyeluruh, dan sistematis tentang tanggung jawab dokter hewan terhadap pencegahan penyakit rabies melalui pelayanan medik veteriner.

Hasil penelitian ini menunjukkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan kesehatan Hewan bersinergi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Penyakit Zoonosis dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas Di Wilayah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pelaksanaan pencegahan penyakit zoonosis. Pelaksanaan pencegahan penyakit rabies di Kota Bekasi melibatkan sektor kesehatan manusia dan kesehatan hewan. Lintas sektor dalam pencegahan penyakit rabies disebut dengan One Health. Faktor yang mempengaruhi tercapainya tanggung jawab dokter hewan dalam pencegahan penyakit rabies melalui pelayanan medik veteriner adalah faktor yuridis dan faktor non yuridis. Faktor yuridis terdapat pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan mengakomodir upaya pencegahan penyakit rabies. Faktor non yuridis meliputi implementasi peraturan di Kota Bekasi belum terpenuhi yaitu sarana penyuluhan dokter hewan ke masyarakat, pengadaan vaksinasi rabies belum maksimal, pelaporan kasus gigitan hewan penular rabies, pengawasan lalu lintas hewan yang dilaporkan oleh dokter hewan ke dinas terkait belum terlaksana.

Kata kunci : hak atas kesehatan, kesehatan hewan, penyakit zoonosis, rabies

ABSTRACT

The right to health is a human right protected by the state and regulated by law. Human health is closely related to animal health, some animal diseases can be transmitted to humans. Zoonosis is a disease transmitted from animals to humans. Rabies is a dangerous zoonotic disease that can cause death. Animal health is the responsibility of veterinarians as an effort to prevent rabies. The formulation of the problem in this study is: How is the regulation of veterinarians' responsibilities in efforts to prevent rabies through veterinary medical services in Bekasi City, how is the implementation of veterinarians' responsibilities in efforts to prevent rabies through veterinary medical services in Bekasi City, what are the challenges in implementing veterinarians' responsibilities in preventing rabies through veterinary medical services in Bekasi.

This research is a qualitative study using a sociological juridical approach. Primary data was collected through field studies and interviews. Secondary data was obtained through books, laws and regulations, texts, journals, and expert opinions. The data analysis method used was qualitative. Data were analyzed descriptively to obtain a clear, comprehensive, and systematic picture of veterinarians' responsibilities in preventing rabies through veterinary medical services.

The results of this study indicate that *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan* and *Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan* are in synergy with *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Penyakit Zoonosis* and *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas Di Wilayah Kabupaten/Kota* which regulate the implementation of zoonoses disease prevention. The implementation of rabies prevention in Bekasi City involves the human health and animal health sectors. Cross-sectoral in rabies prevention is called One Health. Factors that influence the achievement of veterinarians' responsibilities in preventing rabies through veterinary medical services are legal and non-legal factors. The legal factors contained in *Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan* accommodate efforts to prevent rabies. Non-legal factors include the implementation of regulations in Bekasi City that have not been fulfilled, namely the provision of veterinary counseling facilities to the community, the provision of rabies vaccinations that have not been maximized, reporting of cases of animal bites that transmit rabies, and monitoring of animal traffic reported by veterinarians to the relevant agencies that have not been implemented.

Keywords: right to health, animal health, zoonotic diseases, rabies